

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikumWr.Wb

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selanjutnya salawat beriring salam taklupa pula penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah berhasil membawa umatnya dari zaman kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Guna memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Master Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Islam Riau, maka penulis diharuskan untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk Tesis. Pada kesempatan ini penulis membuat Tesis yang berjudul **“Pergeseran Kewenangan Daerah Otonom Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Pasca Reformasi (Kajian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004)”**.

Pergeseran kewenangan pemerintahan daerah dibidang kehutanan, agraria atau pertanahan dan fiskal pasca reformasi yaitu di bidang kehutanan, sebagian besar kewenangan masih berada di tangan Pemerintah Pusat. Di tingkat daerah, kewenangan dalam pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan kawasan hutan serta beberapa perizinan non-kayu diserahkan kepada Provinsi. Pemerintah Kabupaten diberikan porsi kewenangan terbatas dalam mengelola implementasi KPH sebagai

penerusan kewenangan provinsi di tingkat Kabupaten/Kota. Pengelolaan Taman Hutan Raya diserahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota namun dalam segala pemanfaatan yang terbatas sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Di bidang pertanahan, Provinsi tidak mempunyai banyak kewenangan implementasi. Kabupaten/Kota mendapat porsi kewenangan yang lebih besar dalam hal mengidentifikasi dan mendaftarkan tanah-tanah ulayat dan tanah telantar. Kewenangan ini didukung oleh ketentuan lain di tingkat nasional yang disebut Peraturan Bersama Empat Menteri (Perber) dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 9/2015 yang memberikan otoritas bagi Kabupaten/Kota untuk mengakui klaim hak-hak atas tanah masyarakat adat dan lokal, termasuk klaim yang lokasinya berada dalam kawasan hutan. Sedangkan di bidang fiskal adalah kebijakan yang dilakukan dengan cara mengubah pengeluaran dan penerimaan negara yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta keadilan dalam distribusi pendapatan. Dan implikasi dari pergeseran kewenangan daerah otonom dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia yaitu dilihat di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten/kota dan di tingkat desa. Hal ini tentunya akan memberikan implikasi-implikasi tertentu bagi para penyelenggara otonomi daerah, khususnya yang berada pada ketiga tingkatan tersebut.

Dalam penulisan tesis, penulis banyak mendapatkan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada orang-orang yang telah berjasa kepada penulis, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL, selaku Rektor yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, MEc., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H, sebagai Ketua Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana yang telah banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini telah memberikan bekal kepada penulis sehingga penulis memiliki ilmu pengetahuan dibidang hukum;
4. Bapak Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, SH., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memeriksa dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis;
5. Bapak Dr. H. Saifuddin Syukur, SH., M.CL., selaku Pembimbing II yang juga telah bersedia meluangkan waktunya dan pikirannya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis;

6. Staf dan pegawai tata usaha yang telah memberikan pelayanan dengan baik selama penulis menuntut ilmu di Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
7. Kedua orang tua penulis haturkan kepada Amak Hj.Rosma, S.Pd semoga sehat dan bahagia selalu dan Ayah Hamdani yang telah berpulang ke sang Khaliq tanggal 31 Maret 2011 (tujuh tahun yang lalu) semoga ditempatkan dengan hamba-hambaMu yang sholeh.
8. Kakak Ummi Rasyidah, S.pd, M.Pd, semoga sekolah program doctoralnya lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Serta adik Zahidatul Hikmah,S.Ip, kita sama wisuda periode ini ya dik.
9. Mbak Maya dan dek Ila, yang mengukirkan sejarah di S2 hingga akad nikah, semoga silaturahmi kita senantiasa terjaga.
10. Untuk Abuzar Alghifari, S.Ud, M.Ag, yang sekarang sudah bisa dipanggil dengan sebutan suami, tepatnya dua hari sebelum ujian thesis, yang ikhlas ya masa cutinya dihabiskan menemani istri mu ini dengan perintilan mengejar wisuda. Semoga kehidupan kita kedepannya barokah hingga surga.

Penulis telah berusaha dengan sepenuh daya upaya yang ada pada penulis masih kurang sempurna baik bentuk, susunan, tata bahasa maupun nilai ilmiahnya. Ini disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan dari Bapak/Ibu/Sdr/I yang membaca tesis ini.

Penulis mendoakan semoga bantuan Bapak/Ibu/Sdr/I berikan kepada penulis mendapat pahala dari Allah SWT dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan di program studi ilmu hukum, pascasarjana Universitas Islam Riau. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih yang semoga bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpaldari Allah SWT.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Pekanbaru, 07 Maret 2018
Penulis

MASNA HAYATI